BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota tidak hanya hadir sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang yang dipenuhi makna, tempat berbagai kepentingan dan imajinasi saling bertemu. Dalam pengertian ini, kota merupakan hasil dari konstruksi sosial yang kompleks. Lefebvre (1991, dalam Purcell, 2014: 143) menyebut kota sebagai ruang yang terus-menerus dibentuk oleh pengalaman kolektif dan relasi kuasa yang beroperasi di dalamnya. Salah satu problem klasik dalam kajian mengenai kota adalah cara kota ditata dan dimaknai berdasarkan kategorisasi spasialnya.

Kota sebagai ruang sosial tidak hanya diisi oleh bangunan dan aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh narasi, simbol dan juga tafsir yang terus diproduksi oleh berbagai aktor. Dalam hal ini, kota dapat dipahami sebagai sebuah "teks" yang terbuka terhadap penafsiran, di mana makna-makna tentang siapa yang layak tinggal, siapa yang dianggap menggangu dan kawasan yang dinilai berharga, dibentuk melalui pertarungan wacana. Morris (2023) menunjukkan bahwa perpindahan manusia ke kota sering kali dimotivasi oleh bayangan akan kesejahteraan yang ditanamkan oleh imajinasi urban. Nabila (2023) juga menegaskan bahwa kota adalah ruang yang dibentuk oleh kekuatan berwujud dan tak berwujud, dalam artian ini dapat dipahami seperti kebijakan-kebijakan hingga narasi popular yang mengisi ruang-ruang virtual dan aktual.

Proses ini, menurut Ferreira (2020), menciptakan fragmentasi dan hierarki sosial dalam kota, terutama ketika kelompok masyarakat yang berbeda menempati ruang yang sama namun tidak setara baik secara akses dan olah-alih pergerumulan persepsi. Hal ini juga yang menjadi dasar munculnya dikotomi antara kawasan "*yang-dianggap-formal*" dan juga "*yang-dianggap-*

informal", antara ruang yang dianggap representatif dan ruang yang dinilai *bermasalah*. Pembentukan makna terhadap ruang bukan hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui citra yang beredar baik melalui media, birokrasi, dan wacana publik.

Pola fragmentasi ini kemudian memunculkan pembelahan simbolik dalam tubuh kota- antara kawasan yang dianggap "teratur" yang mencerminkan idealisasi kota modern, dan kawasan yang dinilai sebagai "gangguan" terhadap tatanan tersebut. Salah satu bentuk konkret dari dikotomi ini hadir dalam konsep kampung kota, yang menempati ruang di antara yang-tidak-ada-di mana-mana, tidak sepenuhnya menjadi bagian "kota" sekaligus juga bukan "desa". Kampung kota sering kali dianggap sebagai kawasan *substandard* yang tidak sesuai dengan norma ruang formal. Widjaja (2013), mengutip Kraussc (1975), menjelaskan bahwa kampung kota adalah bentuk permukiman dengan karakteristik hunian yang padat, informal, dan kerap tidak terintegrasi secara administratif maupun infrastruktur. Ketidakteraturan ini lantas menjadi dasar munculnya pelabelan seperti "kumuh" atau "rawan". Namun, sebagaimana diperingatkan oleh Marris (dalam Sarli dkk., 2020), label semacam ini lebih banyak mencerminkan cara pandang eksternal yang memosisikan kampung kota sebagai anomali dalam tata ruang 'resmi' kota, sebagai ruang yang 'butuh' bukan yang 'berdiri sendiri'.

Dalam kerangka pandang seperti itu, bentuk permukiman seperti kampung kota yang sering kali diasosiasikan dengan kondisi yang dianggap 'belum selesai' baik secara infrastruktur maupun secara sosial ini menjadi *pondasi* yang melegitimasi tindak-laku kaitan antara perilaku dan ruang. Ilham (2019) menyebutkan bahwa kerentanan struktural yang melekat pada permukiman

semacam ini sering kali dikaitkan dengan potensi perilaku menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan hidup. Tutrianto (2018) juga menunjukkan hal serupa bahwa aktivitas-aktivitas 'ilegal' yang muncul dalam konteks semacam ini kerap diposisikan sebagai strategi bertahan hidup. Pola berpikir ini dengan cepat menghasilkan logika yang menyambungkan antara ketidakteraturan ruang dengan potensi kriminalitas.

Cara manusia membicarakan suatu kawasan sering kali tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengatur cara pandang, merasakan, bahkan bersikap terhadap kawasan tersebut. Dalam hal ini, wacana bekerja bukan sebagai cermin yang memantulkan realitas sebagaimana adanya melainkan bekerja sebagai bingkai yang memilih sebagian aspek, menyingkirkan yang lain dan menetapkan makna tertentu sebagai dominan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa hal tertentu dapat diucapkan dan hal lainnya tidak. Seperti dalam kasus kampung kota, yang sering terdengar adalah bukan mengenai bagaimana warganya hidup sehari-hari, namun bagaimana ruang itu ditandai sebagai "kumuh"; "tidak teratur"; atau sebagai ruang yang "belum selesai". Sekali ruang (secara spasial) itu disebut sebagai "kampung kota" maka ia ditarik ke dalam jaringan makna tertentu tidak resmi, berisiko, dan dalam banyak kasus menyoal mengenai kriminalitas. Disisi lain, Ferreira (2020) menekankan bahwa label ini tidak semata-mata merefleksikan kondisi aktual, melainkan juga dibentuk oleh persepsi dan wacana (Body-Gendrot, 1995, dalam Ferreira, 2020: 3) yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks ini, Paul Ricoeur (1981, dalam Runturambi 2009: 63) menjelaskan mengenai kejahatan dapat dibaca sebagai sebuah wacana yang

terus mengalami pergeseran maka, tergantung siapa yang membicarakannya, dalam konteks apa dan dengan tujuan seperti apa. Kejahatan sebagai wacana tidak hanya merujuk pada peristiwa aktual melainkan melibatkan proses pemberian makna yang melibatkan berbagai aktor sosial.

Proses pembentukan wacana tentang suatu kawasan melibatkan mekanisme klasifikasi informal, di mana ruang-ruang tertentu dibedakan, ditandai, dan dibicarakan secara khas dalam relasi sosial yang lebih besar (Wilson, 2024). Julukan “Negara Beling” yang dilekatkan pada kawasan Cicadas sejak era 1980-an merupakan contoh konkret bagaimana sebuah istilah dapat tumbuh menjadi sistem makna yang melebihi fungsi deskriptifnya. Ia tidak hanya merujuk pada kondisi fisik atau tingkat kriminalitas di masa lalu, melainkan juga pada identitas kolektif yang hidup dan dinegosiasikan warga hingga kini.

Barker (2009) menjelaskan bahwa julukan ini memiliki makna ganda: "negara" merujuk pada sistem kuasa informal yang beroperasi di kawasan tersebut, sementara *"beling"* secara denotatif menggambarkan kondisi kumuh dengan banyak sampah kaca *(beling)* dan secara konotatif mengacu pada karakter "tajam" yang diasosiasikan dengan kriminalitas. Konstruksi sosial kejahatan tidak dapat dipisahkan dari konteks ruang di mana praktik tersebut terjadi. Ruang tidak sekadar menjadi lokasi fisik, melainkan arena di mana makna sosial diproduksi dan direproduksi. Dalam konteks ini, kejahatan bukan sekadar peristiwa individual, tetapi juga representasi dinamika sosial yang lebih luas yang membentuk pemahaman kolektif tentang suatu kawasan terutama kawasan perkotaan.

Kota Bandung merupakan gambaran salah satu kota besar yang berperan sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat dengan letak kota yang sangat strategis bagi perekonomian maupun sosial. Cicadas sebagai salah satu kawasan di Kota Bandung berada di jalur strategis yang berada di Jalan Ahmad Yani (dahulu *Groote Postweg* atau Jalan Pos Raya) (Al-Athas, 2016) sebagai tempat hilir-mudik pendatang-pemukim. Meski secara administratif merujuk pada Kelurahan Cicadas di Kecamatan Cibeunying Kidul, dalam persepsi warga lokal 'Cicadas' mencakup area yang lebih luas di sekitar Jalan Ahmad Yani. Dalam sejarahnya kawasan ini dikenal sebagai pusat *'hiburan'* dengan keberadaan Gang Son Pung yang dikenal sebagai tempat lokalisasi di berbagai gang kawasan ini dan bioskop-bioskop di era Bandung 1980-an, menjadikan kawasan ini ramai dan *"sibuk*" sejak dahulu. Konsep ruang perkotaan yang kompleks dan dinamis ini tercermin dengan jelas dalam konteks Kota Bandung, khususnya kawasan Cicadas, yang menggambarkan bagaimana identitas urban terbentuk melalui interaksi sosial dan sejarah.

Liputan CNN pada tanggal 3 Desember 2023 dengan judul "Cicadas, Kisah di Balik Julukan Negara Beling" menunjukkan bagaimana istilah ini masih dimaknai relevan dalam narasi kontemporer tentang kawasan ini juga sebagai penanda bahwa julukan ini berulang kali dirujuk pada kawasan ini. Istilah ini tidak hanya mengacu pada bagaimana kondisi sosial kawasan Cicadas namun juga membentuk suatu pandangan tersendiri terhadap perilaku penduduknya. Secara umum, pandangan negatif seperti kawasan kriminal dapat mengakibatkan hambatan struktural terhadap perkembangan kelompok masyarakat dan juga marginalisasi. Namun, pola respons masyarakat Cicadas menunjukkan dinamika berbeda dari kawasan-kawasan serupa lainnya.

Sementara beberapa kawasan dengan sejarah kriminalitas menunjukkan upaya sistematis mengubah citra negatifnya, masyarakat di kawasan Cicadas mengembangkan bentuk adaptasi tersendiri.

Cicadas menjadi kawasan yang menonjol bukan hanya karena sejarahnya sebagai gerbang kota Bandung pada masa lalu, tetapi juga karena citranya yang lekat dengan kriminalitas dalam jangka waktu panjang. Pandangan ini tetap bertahan meskipun kawasan telah mengalami berbagai perubahan. Seperti yang ditunjukkan oleh Dayanti & Legowo (2021) di Dusun Candi dan Riauroikha (2023) di Kampung Bugis, stereotip kawasan kriminal cenderung berujung pada marginalisasi dan terbatasnya akses warga terhadap pelayanan publik. Contoh lainnya adalah Desa Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, yang dilabeli sebagai sarang kriminal setelah insiden pengeroyokan (Wardani, 2024). Label seperti ini biasanya berangkat dari peristiwa insidental yang dilakukan oleh oknum, namun kemudian diperluas menjadi generalisasi terhadap seluruh penduduk dan kawasan. Oleh karena itu, pelabelan kawasan sebagai *'kriminal'* perlu dipahami bukan sebagai sesuatu yang natural, melainkan sebagai konstruksi sosial yang diproduksi dan direproduksi melalui peristiwa, narasi, serta relasi kuasa yang bekerja dalam ruang kota.

Umumnya, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengentaskan citra negatif banyak dilakukan seperti perancangan ulang tampilan kawasan dan menjadikan kawasan sebagai kawasan wisata. Namun, Wilson (2024) mengungkapkan bahwa bagaimanapun pemberitaan dan citra baik terhadap kawasan, segala bentuk upaya regenerasi budaya (rekaulang citra) dilakukan, kawasan semacam ini membutuhkan solusi yang nyata. Upaya regenerasi budaya ini tidak lain juga berperan dalam melanggengkan citra itu sendiri secara berulang-ulang.

Kawasan Cicadas juga pernah mengalami masa ini, inisiator tersebut berasal dari pihak eksternal yang menguatkan Marris (dalam Sarli, dkk. 2020) bahwa kawasan "bermasalah" itu merupakan pandangan orang luar. Kampung Akustik Cicadas yang diresmikan tahun 2013 oleh Pemerintah Kota merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki citra kawasan, namun hal ini tidak dapat berlanjut karena berbagai hal yang pada akhirnya membuat warga kembali menjalankan pemenuhan kebutuhan primer sebagai prioritas utama.

Kawasan Cicadas dengan julukan "Negara Beling" ini selanjutnya tidak menunjukkan upaya pengubahan citra yang masif mengingat panjangnya sejarah kawasan. Alih-alih citra ini "tidak ada kekuatannya" bagi masyarakat lokal itu sendiri, selain terhadap pandangan pihak luar yang baru pertama kali berada di kawasan Cicadas memandang kawasan ini dengan pandangan lama yang *terjebak* pada historisnya kawasan. Bentuk adaptasi terhadap citra ditunjukkan dengan masyarakat yang mengambil alih-makna antara normalisasi dan internalisasi label secara berbeda dari istilah sebagai bentuk menyikapi stereotip dan mentransformasikannya menjadi bagian identitas kolektif kawasan.

Salah satu bentuk manifestasi identitas kawasan initerlihat dari pemberitaan yang diliput oleh TVONE pada artikel dengan judul "Sambil Teriak 'Kami Orang Cicadas', Tiga Pemuda di Bandung Nekat Keroyok Anggota TNI" (17 November 2021). Peristiwa ini menunjukkan bagaimana "Cicadas" tidak hanya dimaknai sebagai label geografis atau merujuk pada karakteristik kawasan padat penduduk dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, tetapi telah bertransformasi menjadi penanda identitas yang digunakan secara aktif oleh warga dalam interaksi sosial. Dalam analisis wacana, momentum

seperti ini menjadi rujukan penting untuk memahami bagaimana relasi antara teks dan konteks sosial dapat beroperasi dalam pembentukan makna.

"Negara Beling" menunjukkan bagaimana sebuah istilah dapat memiliki makna yang berlapis dari ungkapan verbal sehari-hari hingga manifestasinya dalam tindakan sosial, berdasarkan hal ini ia bekerja sebagai kerangka pembacaan satu-satunya. Pemberitaan seperti kasus pengeroyokan yang melibatkan seruan 'Kami Orang Cicadas' menggambarkan bagaimana istilah ini telah bertransformasi dari sekadar label geografis menjadi penanda identitas yang aktif digunakan dalam interaksi sosial. Transformasi makna ini terjadi melalui proses panjang yang melibatkan berbagai bentuk komunikasi dan praktik sosial masyarakat.

Hal ini sejalan dengan temuan Sasqia (2020) pada kasus "Kampung Tato" di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, ketika stigma atau pelabelan negatif pada kawasan justru bertransformasi menjadi identitas yang diterima dan bahkan dibanggakan oleh masyarakat setempat. Namun, berbeda dengan Kampung Tato yang transformasi maknanya telah terdokumentasi melalui kajian dekonstruksi, proses serupa di kawasan Cicadas dengan julukan "Negara Beling" belum pernah dikaji secara mendalam. Keterbatasan penelitian yang memahami bagaimana suatu stereotip kawasan dapat diambilalih dan mengalami proses olah-makna menjadi identitas kolektif yang positif menciptakan kesenjangan dalam memahami potensi transformatif dari label negatif terhadap kawasan. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana kekuatan wacana bekerja dalam membentuk realitas sosial pada kawasan 'jahat' dapat dipandang memiliki logika keteraturan sendiri berdasar pada pandangan "ketidakteraturan" yang ditujukan dan digambarkan melalui wacana.

Kejahatan sebagai wacana dipahami dalam kajian linguistik sebagai proses di mana peristiwa tidak hadir sekadar dilaporkan, tetapi juga dibingkai melalui intensi dan persepsi tertentu. Trisnasari (2023) dan Imron (2022) menunjukkan bahwa terdapat aspek keberpihakan dalam praktik penulisan berita kriminal. Dalam hal ini, wacana kriminalitas dibentuk melalui teks tertulis yang menurut Runturambi (2009), melakukan fiksasi terhadap realitas dengan menentukan apa yang layak dimasukkan dan bagaimana peristiwa itu ditafsirkan. Media dan wartawan bertindak sebagai produsen realitas, memilih sudut pandang dan menata narasi. Dengan demikian, media memiliki peran penting dalam mempertahankan representasi kawasan sebagai ruang 'rawan', sering kali dengan *menyederhanakan* peristiwa yang hanya menjadi urusan hukum atau moral tanpa menyentuh latar sosial yang menyertainya atau memahami bagaimana peristiwa itu dimaknai dalam keseharian masyarakat.

Wacana yang dikaji dalam penelitian ini berpusat pada kawasan padat penduduk dengan tingkat kriminalitas tinggi yang termanifestasi dalam produk simbolik "Negara Beling". Julukan ini menggambarkan realitas yang kompleks, namun sejauh ini lebih banyak dibaca dari luar sebagai gambaran tetap daripada sebagai teks yang hidup dan ditentang, diatur dari dalam. Veranita (2022) dalam studinya tentang relasi kepadat penduduk dan tingkat kriminalitas di Indonesia, justru menemukan bahwa kawasan padat memiliki tingkat kriminalitas di Indonesia, justru menemukan bahwa kawasan padat memiliki tingkat kriminalitas lebih rendah. Ia menyoroti fungsi kontrol sosial informal dengan *'mata dan telinga'* warga yang memperkuat mekanisme pengawasan internal dan modal sosial. Temuan ini menggarisbawahi bahwa kaitan antara ketidakteraturan dan kriminalitas tidak bisa dianggap sebagai pola

tunggal dengan memperlihatkan bahwa wacana seperti “Negara Beling” beroperasi dalam konteks sosial yang jauh lebih kompleks daripada sekedar narasi kriminal. Intensi media pada wacana “Negara Beling” mengalami perubahan mulai dari pemberitaan menjelaskan dominan tingkat kriminalitas pada kawasan hingga menjadi bentuk dokumentatif historis kawasan. Hal ini mayoritas hanya insidental dan tidak pada intensitas yang sering, namun meskipun demikian, “Negara Beling” sebagai wacana dipandang sebagai hal umum jika diasosiasikan setara pemahamannya dengan kawasan Cicadas tetap bertahan lama.

Kota Bandung sedang mengembangkan visi pembangunan inklusif, berdasarkan hal tersebut, pemahaman mendalam mengenai bagaimana masyarakat Cicadas berhasil menegosiasikan dan mentransformasi stereotip menjadi penting sebagai pembelajaran dalam menangani kawasan serupa. Kawasan Cicadas ini memberikan perspektif berbeda mengenai bagaimana memahami bahwa wacana stereotip kawasan tidak selalu berujung pada marginalisasai, namun dapat bertransformasi menjadi elemen konstruktif dalam pembentukan identitas kolektif masyarakat. Tauran (2021) memaparkan bahwa perhatian terhadap kawasan padat penduduk terutama kawasan kampung kota dan pandangan mendasar memandang kawasan ini sebagai kawasan “bermasalah” perlu ditelaah kembali hal ini merupakan hambatan untuk mewujudkan kota yang inklusif tidak hanya bagi kategori seperti gender atau penyandang disabilitas melainkan juga merangkul kelompok ekonomi kelas menengah kebawah bersama-sama.

Penelusuran mendalam terhadap proses transformasi makna stereotip menjadi identitas kolektif ini memungkinkan pengungkapan mekanisme sosial

yang memungkinkan resistensi dan adaptasi juga bentuk respon lainnya oleh masyarakat terhadap *stigma* kawasan. Temuan dari analisis ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang relasi antara wacana dan identitas kawasan, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam pengembangan strategi pembangunan kawasan.

1.2. Rumusan Masalah

Julukan “Negara Beling” yang melekat pada kawasan Cicadas telah menjadi bagian dari cara kawasan ini dipahami dan diidentifikasi, baik oleh masyarakat setempat maupun pihak luar. Julukan ini merujuk pada kawasan padat penduduk dan kriminalitas tinggi yang diingat sebagai penanda kawasan ini. Dalam kehidupan sosial masyarakat Cicadas, julukan tersebut tidak sekadar diterima sebagai label negatif, tetapi dimaknai ulang dengan cara-cara tertentu yang mencerminkan dinamika sosial di kawasan tersebut.

Makna yang terbangun dari julukan ini mencerminkan hubungan kompleks antara pandangan masyarakat luar dan persepsi internal warga terhadap kawasan mereka. Hal ini berbeda dengan kawasan lain yang cenderung mengalami tekanan sosial akibat stereotip negatif. Istilah “Negara Beling” pada kawasan Cicadas justru menunjukkan adanya proses pembentukan makna yang melibatkan adaptasi sosial masyarakat setempat. Namun, bagaimana proses ini berlangsung dan pengaruhnya terhadap dinamika sosial masyarakat masih belum dipahami secara mendalam. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, perkembangan, dan dampak wacana “Negara Beling” terhadap kawasan Cicadas. Penelitian ini akan dielaborasi melalui tiga pertanyaan utama:

1) Bagaimana konstruksi wacana "Negara Beling" pada kawasan Cicadas?

2) Bagaimana dinamika pembentukan wacana baru dalam konteks sosial masyarakat saat ini?
3) Bagaimana implikasi wacana baru masa kini terhadap kawasan Cicadas?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana julukan "Negara Beling" terbentuk, dipertahankan, dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat di kawasan Cicadas. Dengan melihat dinamika wacana yang terbangun dari label tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara wacana publik, persepsi masyarakat, dan identitas kawasan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1) Menganalisis bagaimana konstruksi wacana "Negara Beling" terbentuk pada kawasan Cicadas.
2) Mengidentifikasi dinamika pembentukan dan perkembangan wacana baru dalam konteks sosial masyarakat.
3) Menjelaskan implikasi wacana baru tentang Cicadas masa kini terhadap kawasan Cicadas.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis, sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi antropologi, khususnya dalam kajian wacana dan identitas perkotaan. Analisis wacana kritis model Fairclough, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana stereotip kawasan dapat mengalami transformasi

makna menjadi identitas kolektif yang konstruktif. Temuan penelitian diharapkan memberikan perspektif baru dalam memahami relasi antara wacana, ruang, dan identitas dalam konteks perkotaan, serta bagaimana masyarakat mengembangkan mekanisme adaptasi terhadap stigma sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan pembangunan kawasan yang lebih inklusif. Pemahaman tentang bagaimana masyarakat Cicadas berhasil mentransformasi stereotip menjadi modal sosial dapat menjadi pembelajaran berharga bagi penanganan kawasan-kawasan serupa. Bagi pemerintah Kota Bandung, temuan penelitian dapat menjadi masukan dalam mengembangkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat, khususnya dalam upaya mewujudkan kota yang inklusif.